

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL MYANMAR DI INDONESIA TAHUN 2010-2013

Hastin A. Asih

*Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: has_titin@yahoo.com

ABSTRACT

This research discusses the role of the International Organization for Migration (IOM) in dealing with refugee problems in Indonesia. The background to this study is the refugee problem that occurred in Indonesia increased from the year 2010-2013 that one of them refugees from Myanmar. The existence of these problems make Indonesia need to cooperate with international organizations International IOM. In that time jangkaun refugees from Myanmar in Indonesia has increased. Through role-its role in dealing with the refugees in Indonesia is considered IOM can assist in addressing the refugee problem in Indonesia. Those problems were analyzed using dekskriptif using the framework of international organizations, the role of theory international organizations, international organizations as an aid provider, international organizations in capacity building. From the theoretical approach is given, it can be the answer while that IOM as an international organization has perananan as aid providers and in capacity building in addressing the refugee problem.

Keywords: *International Organizations, The Role of International Organizations, International Organization for Migration (IOM).*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Latar belakang pada penelitian ini adalah masalah pengungsi yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010-2013 yang salah satunya pengungsi asal Myanmar. Adanya masalah tersebut menjadikan Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan organisasi internasional (IOM). Dalam jangkaun waktu tersebut pengungsi asal Myanmar di Indonesia mengalami peningkatan. Melalui peranan-peranannya dalam mengatasi pengungsi di Indonesia IOM dianggap dapat membantu dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode dekskriptif dengan menggunakan kerangka pemikiran organisasi internasional, teori peran organisasi internsaional, organisasi internasional sebagai *aid provider*, organisasi internasional dalam *capacity building*. Dari pendekatan teoritik yang diberikan, dapat ditarik jawaban sementara bahwa IOM sebagai organisasi internasional memiliki perananan sebagai *aid provider* dan dalam *capacity building* dalam mengatasi masalah pengungsi.

Kata Kunci: *Organisasi Internasional, Peran Organisasi Internasional, International Organization for Mration (IOM)*

Permasalahan perpindahan manusia lintas negara telah menjadi perdebatan tersendiri karena perpindahan manusia dijadikan sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan kemunduran ekonomi akibat terjadi peningkatan ketidakmerataan antara negara maju dan berkembang. Ada beberapa hal yang menjadi kunci terjadinya migrasi seperti migrasi yang terpaksa dilakukan karena adanya ancaman terhadap kehidupan dan mata pencaharian, baik yang timbul dari sebab-sebab alamiah atau buatan

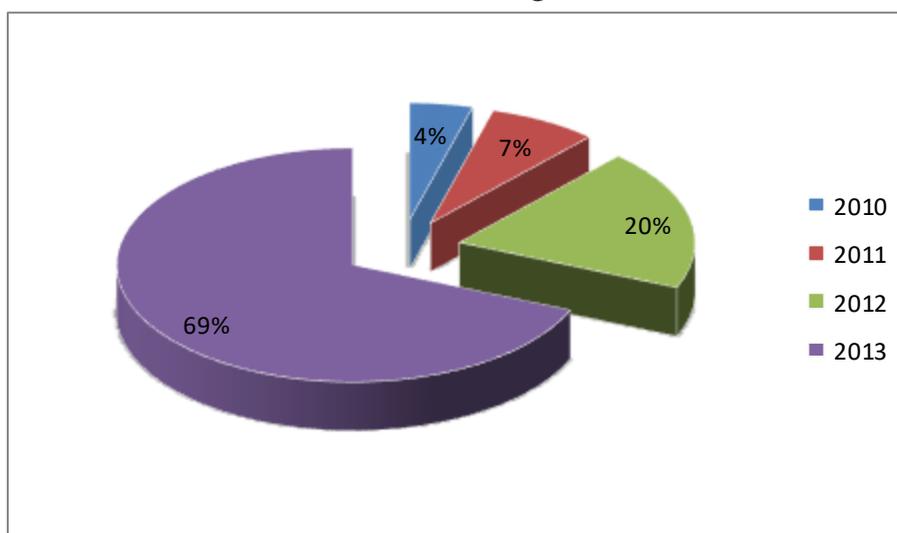
**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

manusia (misalnya gerakan pengungsi dan pengungsi internal serta orang-orang yang terlantar akibat bencana alam atau lingkungan, bencana kimia atau nuklir, kelaparan, atau proyek-proyek pembangunan). Adanya fenomena inilah kemudian muncul penyimpangan-penyimpangan, yaitu dengan melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal (IOM).

Masalah imigran gelap di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah serius dan mendapatkan banyak perhatian. Hal itu terjadi karena posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Migrasi dapat terjadi karena adanya konflik yang tak kunjung usai di dalam negara asal, seperti negara Myanmar yang mayoritas negaranya merupakan etnis Rakhine sedangkan etnis Rohingya tidak diakui oleh Presiden Thein Sein. Sehingga etnis Rohingya melakukan migrasi di negara yang menurut mereka tempat tersebut aman untuk dituju (Berkas DPR).

Dari data PBB telah mencatat kedatangan warga Rohingya ke Indonesia meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2010. Dari data UNHCR pengungsi asal Myanmar yang berada Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2013. Berikut data tersebut di tahun 2010 hanya ada 49 pengungsi yang terdaftar dalam UNHCR, di tahun 2011 jumlah pengungsi menjadi 85 orang, di tahun 2012 juga mengalami peningkatan yakni 222 orang, hingga di tahun 2013 jumlah tersebut mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 781 pengungsi yang terdaftar dalam data UNHCR (UN Data). Berikut Diagram pemetaan jumlah persentase peningkatan pengungsi berdasarkan klasifikasi di atas.

Diagram 1.1 Jumlah Pengungsi Asal Myanmar Di Indonesia Tahun 2010-2013



Sumber: *United Nations High Commissioner for Refugees*

Dampak keberadaan pengungsi dapat berakibat buruk bagi bangsa Indonesia. Apalagi menurut para pengungsi, Indonesia bukan lagi negara transit melainkan negara tujuan. Karena keberadaan pengungsi yang semakin memprihatinkan dan banyaknya pengungsi yang berada Indonesia,

menjadikan Indonesia perlu bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional salah satunya seperti *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani imigran maupun pengungsi. Dalam kerjasamanya dengan IOM, IOM memiliki peranan-peranan dalam membantu Indonesia dalam mengatasi masalah pengungsi yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi pada tahun 2010-2013.

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan kerangka pemikiran organisasi internasional. Dimana, Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (T. May Rudy, 2005). IOM merupakan organisasi antar pemerintah/ *Inter-Governmental Organization* yang merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia, dalam hal ini IOM merupakan organisasi yang melakukan kegiatan operasional dengan membantu untuk menyelesaikan masalah.

Teori peran organisasi internasional Menurut K.J. Holsti, teori peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, adalah bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi (K.J Holsti). Sedangkan menurut Menurut Kelly Kate Pease menyebutkan bahwa tiap-tiap organisasi internasional termasuk IGO memiliki peranan tertentu dalam sistem internasionalnya, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan sifat dasar organisasi internasional (Kelly-Kate S. Pease). Menurut Kelly Kate Pease terdapat 5 peranan yaitu: (1) *problem solving* (2) *collective act mechanism* (3) *Capacity Building* (4) *Common global market* dan (5) *Aid provider* (Kelly-Kate S. Pease). Berdasarkan lima peranan yang dikemukakan oleh Pease organisasi internasional IOM memiliki peran sebagai aid provider dimana IOM menyediakan bantuan-bantuannya dalam setiap operasionalnya dengan ikut membantu para pengungsi melalui program-program yang telah direncanakan. Selain sebagai aid provider IOM juga memiliki peran sebagai capacity building. Dalam peranannya sebagai capacity building IOM terus melakukan berbagai kegiatan dengan mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan kegiatan sosialisasi untuk pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah pengungsi.

Organisasi Internasional Sebagai *Aid Provider* merupakan salah satu bentuk peranan yang disebutkan oleh Kelly Kate Pease yang dapat digunakan untuk menganalisa salah satu peran IOM dalam menangani masalah pengungsi. Dalam hal ini suatu organisasi internasional memiliki peranan penting, salah satu peranan tersebut adalah sebagai *aid provider*, *aid provider* tersebut diwujudkan ke dalam bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu (John D. White). Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa. Bantuan luar negeri digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu: (1) Bantuan Program (*Program Aid*), bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat,

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGGI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

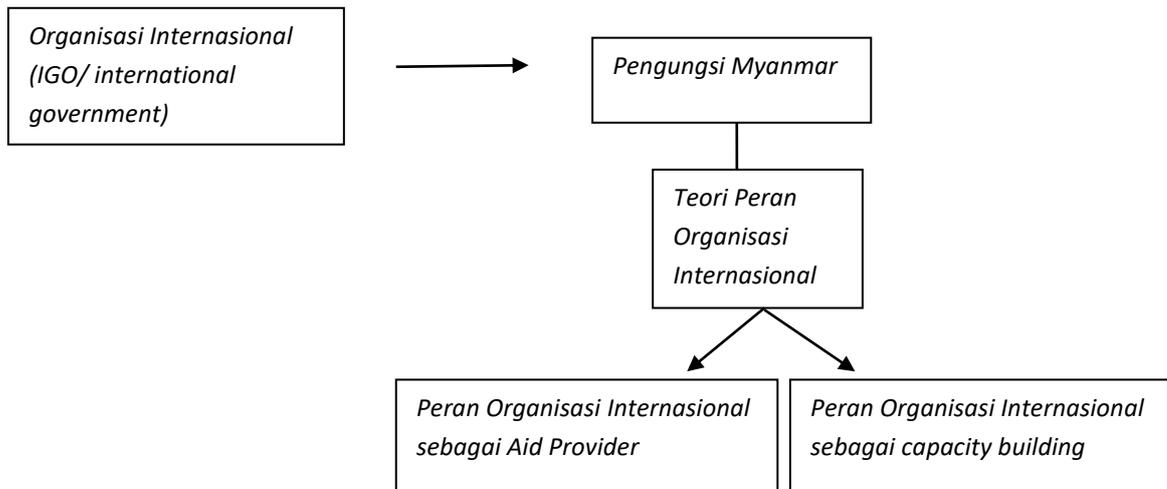
seperti bantuan pangan dan komoditas. (2) Bantuan Proyek (*Project Aid*) adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru. (3) Bantuan Teknik (*Technical Assistance*) bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Bentuk bantuan teknik ini seperti ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri (Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia).

Konsep selanjutnya yang digunakan dalam menganalisa adalah konsep peran organisasi internasional dalam *capacity building*. Konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable*. Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada *improvement in the ability of public sector organizations*. Grindle berpendapat pengembangan kapasitas (*capacity Building*) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu hasil; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut (Grindle, M.S).

Dimensi peningkatan kemampuan ini juga diungkapkan oleh beberapa ahli. Menurut A. Fiszbein peningkatan kemampuan difokuskan pada: (1) kemampuan tenaga kerja, (2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan dan (3) kemampuan "capital" yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumberdaya, sarana, dan prasarana. Sementara itu, D.Eade merumuskan peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu: individu, organisasi, network (D. Eade). Dalam peranannya sebagai *capacity building* IOM melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan peranannya hal itu dilakukan dengan berbagai kegiatannya melalui dimensi kegiatan seperti dimensi pengembangan sumber daya manusia, organisasi maupun kelembagaannya. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan diri dengan kemampuan tenaga kerja dan responsivitas kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi.

Konsep peran organisasi internasional sebagai *aid provider* dan peran organisasi internasional dalam *capacity building* dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui langkah IOM dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Mengingat teori peran organisasi internasional menyatakan bahwa tiap-tiap organisasi internasional termasuk IGO memiliki peranan tertentu dalam sistem internasionalnya, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan sifat dasar organisasi internasional. Peranan organisasi yang mana salah satu bentuknya adalah *aid provider* dan *capacity building* merupakan konsep yang penting sebagai sarana untuk menangani masalah pengungsi di Indonesia. Maka kedua konsep peran organisasi internasional sebagai *aid provider* dan peran organisasi

internsional dalam *capacity building* relevan untuk digunakan sebagai alat untuk menangani masalah pengungsi di Indonesia.



PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION SEBAGAI AID PROVIDER

International Organization for Migration yang didirikan pada tahun 1951 ini merupakan organisasi antar-pemerintah terkemuka di bidang migrasi dan bekerjasama erat dengan pemerintah, mitra pemerintah dan non-pemerintah. Dengan 132 negara anggota, 17 lebih negara yang memegang status pengamat dan kantor di lebih dari 100 negara, IOM didedikasikan untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib untuk kepentingan semua (Ditjen Kemenkumham). IOM memulai operasinya di Indonesia dengan memproses migrant Vietnam di Tanjung Pinang Riau pada tahun 1979 (IOM). *International Organization for Migration* bekerja dalam empat fokus manajemen migrasi. Yaitu, migrasi dan pembangunan, memfasilitasi migrasi, mengatur migrasi dan migrasi yang dipaksakan.

Peran yang dilakukan IOM kepada pengungsi asal Myanmar adalah dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan memastikan para pengungsi dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Okezone). IOM membantu untuk meningkatkan kualitas perawatan migran gelap yang dicegat dan melaporkan diri yang dirujuk oleh Pemerintah Indonesia ke IOM, sesuai dengan standar kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) yang berlaku. IOM menyediakan konseling, perawatan kesehatan, makanan, penampungan, pendidikan dan dukungan kejuruan bagi migran yang menetap di dalam dan di luar Rumah Detensi Imigrasi dan membantu pengungsi yang berharap untuk pulang ke daerah asalnya di bawah program Bantuan Pemulangan Sukarela bagi pengungsi yang mencari suaka dan dikabulkan status pengungsinya oleh UNHCR. IOM juga mengadakan Dana Bantuan Korban untuk menyediakan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan (IOM).

Selain itu IOM menyediakan bantuan teknis yang diperlukan untuk memastikan agar Rumah Detensi Imigrasi dan fasilitas karantina lainnya menawarkan lingkungan hidup yang memadai, aman dan melindungi bagi migran, dengan mematuhi standar-standar HAM internasional (IOM). Di Rudenim atau di tempat penumpangan/akomodasi sementara. Bantuan yang diberikan berupa penanganan medis, pakaian, perlengkapan tidur dan psiko-sosial bagi yang mengalami tekanan hidup. Salah satu yang terutama adalah

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

bantuan interpreter/penterjemah, yang membantu para migran mengkomunikasikan keperluan mereka kepada staff Rudenim dan juga untuk membantu wawancara dengan UNHCR dan perwakilan dari negara ketiga dimana pengungsi dapat ditempatkan (Dillon Staff IOM Indonesia). IOM juga berkontribusi untuk peningkatan dukungan perlindungan terhadap sub-kelompok yang rentan, seperti anak di bawah umur tanpa pendamping dan perempuan yang belum menikah, melalui pembentukan mekanisme perujukan yang melibatkan aktif para pemberi layanan dari pemerintah maupun non-pemerintah di daerah (Berita SetWapres).

Bentuk bantuan lain yang diberikan IOM yakni pemulangan sukarela kepada pengungsi. Terutama bagi pengungsi yang ingin pulang secara sukarela ke negara masing-masing. Pemulangan sukarela merupakan proses pemulangan kembali ke negara asal. Ini merupakan solusi jangka panjang yang dikerjakan oleh UNHCR untuk para pengungsi. Solusi ini merupakan solusi yang sangat efektif karena para pengungsi akan kembali ke negara asal mereka. Indonesia salah satu negara yang menjadi tempat transit bagi pengungsi yang akan menuju ke negara tujuan. Indonesia turut ikut membantu bekerjasama dengan IOM dalam pemulangan sukarela. Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi yang akan menuju ke negara tujuan pengungsi. jumlah pengungsi Myanmar sudah mencapai 82 pengungsi dari tahun 2010-2013 melalui program IOM yakni program *assisted voluntary return*. Dalam proses pemulangan sukarela ini IOM turut dibantu UNHCR. Sehingga dalam proses pemulangan sukarela ini tidak akan dilakukan oleh UNHCR jika negara asal para pengungsi belum aman dan perlindungan nasional belum terkendali bagi para pengungsi (IOM).

Peran IOM yang selanjutnya sebagai *aid provider* adalah bantuan penempatan pengungsi di negara ketiga (*Resettlement*). Pemukiman kembali (*resettlement*) melibatkan pemilihan dan pemindahan pengungsi dari negara di mana mereka telah mencari perlindungan ke negara ketiga yang telah setuju untuk mengakui sebagai pengungsi dengan status tinggal permanen (UNHCR). Dalam pemberian penempatan di negara ketiga memberikan pengungsi dengan perlindungan hukum dan fisik, termasuk akses ke hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama dengan yang dinikmati oleh warga negara (UNHCR). Penempatan di negara ketiga ditujukan agar para pengungsi mendapatkan perlindungan atas hak fundamental, kebebasan, maupun kesehatan yang lebih bebas dibandingkan dengan negara pengungsi. Pada umumnya *resettlement* merupakan beban bersama yang ditanggung oleh para peserta Konvensi 1951 terutama penempatan pengungsi ke Australia dan Selandia Baru.

Di Indonesia, penempatan di negara ketiga menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi mayoritas pengungsi. Di Indonesia, sejak tahun 2001 hingga Desember 2011, sebanyak 1,916 orang telah menerima penempatan di negara ketiga, terutama di Australia. Di Indonesia, penempatan di negara ketiga menjalankan fungsi strategis khususnya dalam hal relevansi terkait “ruang perlindungan” yang diberikan pemerintah bagi pencari suaka dan pengungsi yang baru datang. Australia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang paling diinginkan oleh sebagian besar pengungsi khususnya kelompok pengungsi Myanmar dan Bangladesh. Karena Australia merupakan salah satu negara Penandatanganan Refugee Convention 1951 (The Diplomat News). Australia menyediakan dana untuk UNHCR dan IOM untuk

mendukung migran gelap, termasuk Rohingya, di Indonesia dan beberapa negara regional lainnya (The Diplomat News).

Menurut UNHCR, pengungsi dari Myanmar telah menerima manfaat utama dari program pemukiman kembali (*resettlement*) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, pengungsi Myanmar menyumbang 22.000 dari hampir 75.000 kasus yang diajukan ke UNHCR ke negara ketiga kembali dipertimbangkan. Banyak dari pengungsi dari Myanmar yang merupakan etnis Rohingya tidak dicatat tetapi UNHCR dalam daftar penempatan di negara ketiga. Namun pengungsi Myanmar yang bukan etnis rohinya yang tinggal di kamp-kamp di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar yang akan dimasukkan kedalam daftar resettlement ke Amerika Serikat melalui program kelompok pemukiman yang berakhir pada awal 2014 (Jakarta Globe). IOM Indonesia tahun 2010-2013 telah membantu dalam penempatan ke negara ketiga. Dari tahun 2010 yang hanya 147 hingga 2013 jumlah pengungsi yang mendapat resettlement mencapai 900. Total sampai tahun 2013 ada 2.941 pengungsi yang mendapatkan bantuan dalam penempatan ke negara ketiga (IOM).

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM CAPACITY BUILDING

Dalam penanganan imigran ilegal juga memerlukan kerjasama dengan lembaga internasional dalam hal ini seperti, *International Organization of Migration* dan *United Nation High Commissioner of Refugees*. Namun keberadaan lembaga tersebut juga masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, seperti halnya lembaga internasional IOM yang memerlukan kerjasama dengan pihak pemerintah terkait lainnya dalam meningkatkan kapasitas /capacity building IOM bekerjasama dengan pihak-pihak seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri maupun kerjasama dari Direktorat Jendral Imigrasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. IOM mendukung penuh pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan kegiatan sosialisasi untuk pihak-pihak terkait. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan dibawah pemerintah dan dalam pengawasan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelatihan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan *International Organization For Migration* dalam peningkatan kapasitas dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah pengungsi melalui kerjasama teknik dengan berbagai pihak. Kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri. Kerja sama teknik adalah salah satu alat yang mendukung upaya-upaya diplomasi Republik Indonesia di forum bilateral, regional maupun internasional. Bantuan teknik yang diberikan berupa pelatihan dan pengiriman tenaga ahli (Kemenlu).

Dalam mengatasi permasalahan pengungsi di Indonesia IOM bekerjasama dengan pihak pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya bentuk perundingan kerjasama yang dilakukan IOM dengan berbagai pihak yang yang berhubungan dengan masalah migrasi. Pihak-pihak terkait tersebut seperti, Menteri Politik Hukum dan HAM (POLHUKAM), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Luar Negeri (KEMENLU), Badan Reserse dan Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI), *United Nation High Commissioner On Refugee* (UNHCR), Badan Pemelihara Keamanan Polri (BAHARKAM

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

POLRI), Direktorat Jendral Imigrasi, Dinas Propinsi serta Badan Penelitian dan pengembangan HAM (IOM).

kerjasama IOM dengan Direktorat Jendral Imigrasi merupakan salah satu mitra IOM tersebut melakukan pelatihan dan publikasi yang terkait dengan perawatan migran yang berada dalam Rumah Detensi Imigrasi. Kerjasama IOM dengan salah satu pihak pemerintahan dalam hal ini direktorat jendral imigrasi dimulai dengan adanya perjanjian kerjasama dengan melakukan kegiatan kerjasama teknis tentang Proyek Pengelolaan dan Perawatan Migran Non-Reguler (Pengungsi) yang berada di wilayah Republik Indonesia. IOM akan memberikan bantuan biaya operasional kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dengan memfasilitasi pembiayaan makanan, minuman, kesehatan, dan keamanan (Kemenkumham).

Selain dengan direktorat jendral imigrasi IOM juga melakukan kerjasama dengan pihak kemenkumham dengan membentuk Pelatihan untuk Manajemen Hak Asasi Manusia dan Migrasi. Organisasi Internasional untuk Migrasi menyelenggarakan pelatihan mengenai aspek hak asasi manusia dalam manajemen migrasi bagi para staf profesional dan pengajar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada sesi pelatihan, Hak Asasi Manusia dan Manajemen Migrasi, yakni menanggapi masalah migrasi dengan memberikan pemahaman secara terperinci mengenai aspek hak asasi manusia dalam mempertimbangkan kelompok migran yang lemah dan perlindungan yang tersedia bagi para migran tersebut. Pelatihan itu dimaksudkan pentingnya hak asasi manusia bagi migran yang membutuhkan perlindungan hukum dan perlunya pejabat Indonesia untuk mengetahui perlindungan dan dukungan yang diperlukan para migran (IOM). Dalam kasus pengungsi Myanmar kerjasama IOM dengan Kemenkumham adalah dengan cara memberikan pelatihan pada staff-staff dalam menanggapi masalah pengungsi yang membutuhkan perlindungan hukum. Karena pengungsi asal Myanmar ada yang berasal dari etnis Rohingya, dimana kelompok etnis tersebut merupakan etnis asal Myanmar yang tidak diakui di negaranya.

Kerjasama teknis IOM juga dilakukan dengan Balitbang HAM, kerjasama tersebut diwujudkan kedalam kegiatan Sosialisasi Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim pada 3 September 2012. Dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan output Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim, diharapkan dapat menjelaskan kepada petugas Rudenim dalam menangani/memperlakukan detainee (deteni) yang berada pada Rumah Detensi Imigrasi (Balitbangham). Selain itu IOM juga menjalin kerjasama dengan POLRI, Kerjasama yang dijalin antara Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia adalah dalam bidang pembinaan dan operasional. Dalam bidang pembinaan, kerjasama Polri dan IOM meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan sistem dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional kerjasama Polri dan IOM meliputi kegiatan preemptive, preventif, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. kerjasama IOM dengan UNHCR yakni memfasilitasi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia, menunggu solusi jangka panjang. IOM juga memberikan pengaturan perjalanan, bagi pengungsi yang akan pindah ke negara ketiga dan bagi mereka yang meminta pemulangan sukarela. Bantuan dan dukungan terhadap orang-orang yang menjadi perhatian IOM juga diberikan melalui mitra operasional yaitu UNHCR, UNHCR memberikan pelayanan komunitas.

UNHCR juga menjalankan kunjungan rutin kerumah -rumah untuk memfasilitasi aktivitas kelompok *self-help* (UNHCR).

Selain melakukan kerjasama bantuan teknis sebagai peranannya sebagai *capacity building* IOM yang melakukan kerjasamanya dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam menangani pengungsi, *capacity building* yang lain selain bantuan kerjasama teknis yang dilakukan IOM adalah dengan melakukan koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap pemerintah yaitu dengan melakukan pertemuan antarlembaga internal. IOM Indonesia menandatangani Pengaturan Teknis tentang Kerjasama dalam Pengembangan Kapasitas bagi Penegak Hukum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan angkatan kepolisian terbesar ketiga di dunia (IOM). Koordinasi IOM dan Polri yang terpusat pada pengembangan program, pendidikan, pelatihan dan bantuan teknis. Secara khusus, upaya-upaya pengembangan kapasitas IOM dan Polri akan berfokus untuk: (a) mengembangkan kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat setempat dalam memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (b) memperkuat kurikulum dari fasilitas pendidikan dan pelatihan terkait untuk topik- topik yang menjadi perhatian bersama dan menyangkut keamanan masyarakat; (c) membangun struktur manajemen dan pelaksanaan polisi masyarakat, dengan fokus pada daerah-daerah yang terkena dampak penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (d) mengembangkan materi pendukung informasi audio-visual yang terkait dengan polisi masyarakat dan peranannya dalam pemberantasan penyelundupan manusia dan pencegahan perdagangan orang; dan (e) merancang dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka mencegah dan mendeteksi kejahatan transnasional (IOM).

kerjasama antara IOM dengan POLRI sudah dimulai sejak tahun 2003 yang dimulai dengan memberikan pelatihan kepada perwira polri dalam hak asasi manusia dan pemolisian masyarakat. Dan ditahun 2009-2013 dilatih dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Dan di tahun 2012-2014 Dilanjutkan dengan pelatihan penanganan migran. Dalam kasus Myanmar kerjasama antar lembaga dalam hal ini dengan POLRI, IOM memberikan pelatihan dengan penanganan migran yang melewati Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi (IOM).

Capacity buiding selanjutnya yang dilakukan IOM adalah dengan melakukan kerjasama regional maupun regional. Dalam kerjasama pihak regional maupun internasional, IOM Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam menghadapi tantanagn migrasi yang ada untuk mengikuti perkembangan regional dan internasional yang sedang terjadi saat ini. Terutama strategi dan arah yang berkaitan dengan masalah pengungsi (IOM). Hal itu dibuktikan dengan membentuk kerjasama internasional salah satunya adalah Indonesia dan Australia menggagas penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (BRMC I dan BRMC II), masing-masing pada tahun 2002 dan 2003 (Kemenlu).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana peran *International Organization For Migration* dalam mengatasi pengungsi di Indonesia tahun 2010-2013. Jawaban sementara yang diberikan oleh penulis

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

adalah bahwa melalui organisasi internasional antarpemerintah atau IGO dalam hal ini IOM sebagai lembaga organisasi yang menangani permasalahan imigran asal Myanmar di Indonesia memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada supaya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam peranannya tersebut IOM memiliki peranan sebagai *aid provider*, *Aid provider* di sini merupakan bentuk bantuan luar negeri (*foreign aid*) yang diberikan IOM dalam mengatasi masalah pengungsi. Selain memiliki peranan sebagai *aid provider*, IOM juga memiliki peranan sebagai *capacity building*.

Dalam peranannya sebagai *aid provider* IOM dalam menangani masalah pengungsi ilegal yaitu dengan memberikan bantuannya kepada pengungsi melalui program-programnya seperti melalui program *migrant care*. Melalui program-program tersebut IOM memberikan penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap maupun pengungsi yang dengan sengaja menyerahkan diri kepada pihak imigrasi dan berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain memberikan bantuannya kepada pengungsi asal Myanmar di Indonesia, IOM juga ikut serta dalam peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi.

Dalam peningkatan kapasitas IOM juga mendukung penuh pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan kegiatan sosialisasi untuk pihak-pihak terkait. Seperti memberikan pelatihan dan memberikan bantuan teknis kepada pihak keimigrasian Indonesia dalam mengidentifikasi imigran gelap dan dokumen-dokumen di tempat-tempat yang rawan dimasuki oleh para imigran. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan dibawah pemerintah dan dalam pengawasan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelatihan.

Dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan IOM cukup membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pengungsi khususnya pengungsi asal Myanmar. Karena keberadaan IOM bagi Indonesia turut membantu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan menyediakan perlindungan bagi para pengungsi untuk bertahan hidup selama berada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan pengembangan HAM, "Sosialisasi Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim", online at <http://balitbangham.go.id/index.php/3-news/newsflash/190-sosialisasi-buku-pedoman-ham-bagi-petugas-rudenim>
- Berita SetWaPres Republik Indonesia," Perlukah Pulau Khusus dalam Menangani Pengungsi?", online at <http://www.wapresri.go.id/perlukah-pulau-khusus-dalam-menangani-pengungsi/>
- Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri*. 1999, 4.
- D., Eade *Capacity Building: An approach to people-centered development*, (Oxford, UK: Oxfam, GB, 1998) online at <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=oCEMQFjAHahUKEwjB8v-typHIAhWUA44KHfMVDM4&url=http%3A%2F%2Fold.bappenas.go.id%2>

- [Fget-file-server%2Fnode%2F8635%2F&usg=AFQjCNHLp1oUIjxLiabxEWBSeIPJYgW9og&sig2=Ar8Qnk9dTXyQTTXB_U5o7w](#)
- Dillon Paul Staff IOM Indonesia, email interview
- Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, "Menkumham Menerima IOM", online at http://jakartapusat.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:menkumham-menerima-iom&catid=36:berumum
- Grindle, M.S.,(editor), Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, (MA: Harvard Institute for International Development. Boston, 1997), 22.
- Holsti, K.J, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa, (Bina Cipta, Bandung, 1987)
- International Organization for Migration, "Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Pada Tahun 2013", online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>
- International Organization for Migration, "Migration Facts figure", online at <http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html>
- International Organization for Migration, "Sejarah IOM Indonesia",online at <http://www.iom.or.id/id/iom-indonesia/sejarah-iom-indonesia>
- International Organization for Migration," Imigrasi dan Manajemen Perbatasan", online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/Factsheet%20-%20IBM%20-%20IND.pdf>
- International Organization for Migration, "Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Pada Tahun 2013", online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>
- International Organization for Migration, "Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Pada Tahun 2013", online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>
- International Organization For Migration," Pelatihan untuk Manajemen Hak Asasi Manusia dan Migrasi online at: <http://www.iom.or.id/id/pelatihan-untuk-manajemen-hak-asasi-manusia-dan-migrasi#sthash.UhKfeR2B.dpuf>
- International Organization for Migration, "Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia," online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/News-Oktober-IND-ZPO6.pdf>
- International Organization for Migration, "Upaya Memerangi Penyelundupan Manusia Pada Tahun 2013", online at <http://www.iom.or.id/sites/default/files/January%202014%20Newsletter%20Indonesian.pdf>
- Jakarta Globe," Rohingya in Indonesia Wait for Resettlement", online at <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/rohingya-indonesia-wait-resettlement/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,"kerjasama teknik", online at <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=1&l=id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," Menkumham Ajukan Penempatan Pengungsi dan Imigran Ilegal Terkonsentrasi dalam Sebuah Pulau kepada IOM", online at: <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/323-menkumham-ajukan->

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENGATASI PENGUNGSI ASAL
MYANMAR DI INDONESIA**

- [penempatan-pengungsi-dan-imigran-terkonsentrasi-dalam-sebuah-pulau-kepada-iom#sthash.mmIjrlx2.dpuf](#)
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Bali Process", online at <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id>
Okezone, "IOM Turut Beri Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya", online at <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/18/1163862/iom-turut-beri-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya>
Pease, Kelly-Kate S., International Organization: Perspectives on Governance in The Twenty-First Century, (New Jersey:Prentice Hall, 2000)
Rudy, T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, (Bandung, Refika Aditama, 2005)
Simela Victor, Muhammad, "Masalah Pengungsi Rohingya, INDONESIA, Dan ASEAN online at Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI" online at http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-10-II-P3DI-Mei-2015-7.pdf
The Diplomat News, "Australia and the Southeast Asia Refugee Crisis", online at <http://thediplomat.com/2015/07/australia-and-the-southeast-asia-refugee-crisis/>
United Nations High Commissioner for Refugees, "UNHCR Refugee Resettlement Trends 2015", online at <http://www.unhcr.org/559e43ac9.pdf>
United Nations High Commissioner for Refugees, "A New Beginning in a Third Country", online at <http://www.unhcr.org/pages/4a16b1676.html>
UN Data a world Information "UNHCR Statistical Database | United Nations High Commissioner for Refugees" online at <https://www.data.un.org/Data.aspx?d=UNHCR&f=indID%3AType-Ref#UNHCR>
White, John D., The Politics of Foreign Aid. (The Bodley Head. London, Sydney, Toronto. 1974), 188.